

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana terjadinya ketidakmampuan suatu individu atau kelompok individu tertentu dalam memenuhi kebutuhan yang menjadi standar hidup rata-rata masyarakat pada umumnya. Kemiskinan merupakan suatu fenomena maupun dinamika kompleks yang bersifat fluktuatif dan multidimensi dalam realita sosial-ekonomi dimana hal ini terus menjadi tantangan serta prioritas dalam setiap rencana ataupun tujuan pembangunan suatu negara. Baik negara maju maupun negara berkembang tidak luput dari berbagai tingkatan permasalahan kemiskinan yang kompleks, Dimana hal ini terjadi disebabkan oleh banyak sekali faktor-faktor yang bertanggung jawab dan saling memiliki keterkaitan terhadap pembentukan fenomena kemiskinan di tengah kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang terus berhadapan dengan permasalahan kemiskinan sehingga pemerintah melalui segala upaya kebijakan dan berbagai prioritas program kerja berusaha dengan maksimal untuk melakukan pemberdayaan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan pada tujuan pembangunan nasional yang tertera dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wadah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka negara Indonesia memiliki tujuan dalam menciptakan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan Makmur secara merata baik dalam

material dan spiritual sehingga tercapailah negara Indonesia yang Merdeka, Bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman dan Sejahtera. Untuk mencapai cita-tia negara yang tercantum dalam tujuan pembangunan nasional tersebut, maka salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan pengentasan atau penurunan angka kemiskinan dengan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pertumbuhan perekonomian yang memadai dengan upaya melalui berbagai pembentukan atau penguatan kebijakan-kebijakan dan rencana kerja pemerintah yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJP Nasional 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan bagian yang menjadi tahapan penting dalam mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena dapat mempengaruhi indikator keberhasilan pencapaian target program kerja yang tertuang dalam RPJPN. Dalam rencana pencapaian target, diharapkan negara Indonesia telah berhasil masuk dalam kelompok negara-negara yang berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) dengan didukung oleh pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing sehingga dapat tercipta percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan berfokus pada tingkat perekonomian yang kokoh dan berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah.

Salah satu rencana *masterplan* yang tertuang dalam rencana pembangunan adalah dengan pencapaian target terhadap penurunan tingkat angka kemiskinan di negara Indonesia. Kemiskinan menjadi agenda prioritas dalam rencana pembangunan jangka panjang sehingga pemerintah berupaya dengan maksimal menjalankan berbagai program kerja dan membentuk kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong penurunan angka kemiskinan sehingga melalui tindakan-tindakan tersebut dapat diupayakan penurunan angka kemiskinan sesuai target yang direncanakan yaitu angka kemiskinan berada di kisaran persentase 6%-7%. Rencana penurunan angka kemiskinan tidak hanya menjadi tantangan dan tugas bagi pemerintah pusat namun diharapkan hal ini juga menjadi sejalan dengan berbagai pemerintah daerah di berbagai wilayah bagian negara Indonesia. Dengan adanya dukungan peningkatan pembangunan melalui program dan rencana kerja yang memadai dari berbagai daerah di wilayah negara Indonesia maka akan dapat memberikan kontribusi besar untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan pembangunan dalam bidang ekonomi secara nasional sehingga dapat tercapai target rencana pembangunan jangka panjang sebagaimana dimaksud.

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu daerah bagian dari Kawasan Timur Indonesia yang memiliki angka persentase tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Dengan melihat pada hasil persentase tingkat kemiskinan yang dicapai oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat pemerintah daerah setempat sangat menyadari bahwa fenomena kemiskinan yang

terjadi masuk dalam kategori lumayan ekstrim sehingga pemerintah daerah perlu melakukan berbagai kajian khusus secara bertahap dan berkelanjutan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi dan bertanggung jawab akan peningkatan tingkat persentase kemiskinan di provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini menjadikan kemiskinan turut menjadi agenda prioritas dalam rencana kerja pemerintah daerah dimana pemerintah perlu melakukan fokus utama pada pencapaian target penurunan dan pengentasan angka kemiskinan dengan membentuk berbagai program kerja dan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembentukan pembangunan baik secara infrastruktur atau kinerja masyarakat yang memadai melalui pembentukan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sedemikian rupa untuk pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam wilayah tersebut.

Tabel 1.1
Data Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2013-2023

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2013	1.006.900	20,41
2014	994.680	19,60
2015	1.159.840	22,61
2016	1.149.920	22,19
2017	1.150.790	21,85
2018	1.142.170	21,35
2019	1.146.320	21,09
2020	1.153.760	20,90
2021	1.169.310	20,99
2022	1.131.620	20,05
2023	1.141.110	19,96

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah, 2024

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur setiap tahunnya masih mengalami perubahan yang bersifat fluktuatif dimana perubahan-perubahan tersebut belum menunjukkan peningkatan atau penurunan yang bersifat konsisten. Tingkat persentase penduduk miskin mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 3,01% menjadikan persentase penduduk miskin pada tahun 2015 menjadi sebesar 22,61% dimana pada tahun sebelumnya angka persentase berada pada angka 19,60%. Kemudian, angka persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan yang bertahap sebesar 1,71% sampai pada tahun 2020 angka persentase penduduk miskin menjadi 20,90%. Terjadinya penurunan secara bertahap tersebut tentu tidak lepas dari upaya pemerintah yang mengeluarkan berbagai program dan rencana kerja serta berbagai kebijakan yang turut membantu dan mendorong masyarakat terkhususnya masyarakat yang tergolong dalam penduduk miskin sebagai sumber daya manusia untuk dapat turut berkontribusi dan berkolaborasi sebaik mungkin dalam menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah yang memadai dan efektif berdasarkan sumber daya alam setempat. Namun, pada tahun 2021 terjadi kenaikan persentase angka penduduk miskin sebesar 0,09% dimana kenaikan tersebut terjadi akibat adanya pandemic COVID-19 yang mendesak pemerintah untuk mengarahkan fokus utama berbagai bidang termasuk bidang perekonomian terhadap bidang kesehatan sebagai upaya dalam penanggulangan COVID-19. Perlu diberikan apresiasi bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur sehingga dengan adanya dampak COVID-19 pemerintah dan masyarakat terus berinovasi dalam perekonomian sehingga angka jumlah penduduk

miskin mengalami kenaikan hanya sebesar 0,09% selama masa COVID-19. Kemudian, pada tahun 2023 angka persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 0,09% yang menjadikan angka persentase tahun sebelumnya berada pada angka 20,05% menjadi 19,96%. Meskipun angka persentase penduduk miskin mengalami penurunan, namun pencapaian angka persentase tersebut masih menempatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi termiskin ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat. Hal ini mendorong pemerintah untuk terus mengupayakan pengentasan kemiskinan secara bertahap sehingga Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat secara perlahan menurunkan angka persentase penduduk miskin hingga pada target yang diinginkan sehingga dapat membantu mengentaskan kemiskinan secara nasional.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara merata merupakan kunci dalam peranan menekan angka kemiskinan di suatu wilayah. Dengan melakukan peningkatan terhadap pembangunan di bidang ekonomi pada wilayah-wilayah yang mengalami tingkat kemiskinan tinggi maka akan sangat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Salah satu variabel atau faktor penting yang menjadi indikator keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dan syarat untuk mengurangi angka kemiskinan adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan suatu indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di setiap wilayah. PDRB menunjukkan gambaran yang signifikan mengenai kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia sehingga nilai PDRB juga bergantung pada

potensi dan pengelolaan sumber daya yang ada. Dengan berdasarkan pada potensi sumber daya alam masing-masing daerah, maka nilai PDRB yang dihasilkan oleh setiap daerah juga memiliki nilai atau hasil yang berbeda pula. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkolaborasi bersama masyarakat daerah setempat untuk dapat terus menggali potensi sumber daya alam dan meningkatkan kemampuan pengelolaan sumber daya sampai pada tahap produksi sehingga dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap nilai PDRB daerah yang turut menunjukkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi.

Tabel 1.2

**Data [Seri 2010] Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2013-2023**

Periode	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 (%)
2013	5,41
2014	5,05
2015	5,03
2016	5,12
2017	5,11
2018	5,11
2019	5,25
2020	(-0,84)
2021	2,52
2022	3,05
2023	3,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah, 2024

Berdasarkan pada Tabel 1.2 yang menunjukkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADH Konstan 2010 di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rentang waktu selama tahun 2013 hingga tahun 2023 dapat dilihat bahwa

laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan angka persentase mencapai 5,415 dimana tingkatan angka persentase tersebut didominasi oleh lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan sedangkan pencapaian terendah berada pada lapangan usaha yang bergerak di bidang pengadaan listrik dan gas. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur pada dasarnya memiliki potensi kemampuan dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sedangkan untuk pengadaan listrik dan gas pada saat itu belum memasuki tahapan yang memadai sehingga masih dibutuhkan rencana pembangunan bertahap secara merata terhadap pengadaan listrik dan gas dimana listrik dan gas juga merupakan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Namun, laju pertumbuhan PDRB tersebut mengalami penurunan sebesar 0,38% menjadikan PDRB pada tahun 2015 berada pada angka 5,03%. Dengan angka penurunan laju PDRB tersebut, lapangan usaha yang bergerak di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan masih memegang posisi teratas dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. PDRB ADH Konstan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menunjukkan tingkatan perubahan yang fluktuatif hingga pada tahun 2020 laju pertumbuhan tersebut merosot pada angka minus yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi pada saat itu yang bergerak di berbagai bidang lapangan usaha sangat tidak stabil. Terjadinya penurunan laju pertumbuhan tersebut juga tidak terlepas dari terjadinya pandemic COVID-19 yang menyebabkan terhentinya berbagai pergerakan

ekonomi di berbagai bidang dan mengarahkan keseluruhan bidang untuk berfokus utama kepada bidang yang bergerak di kesehatan untuk mengurangi angka penularan COVID-19 di wilayah Nusa Tenggara Timur. Bermulanya pandemic COVID-19 menjadi tantangan yang sangat mendesak tidak hanya bagi pemerintah namun juga bagi setiap lapisan masyarakat yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Secara garis besar, kondisi tersebut mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pembaharuan dan penyesuaian dalam waktu yang lama sehingga terjadi penurunan angka laju pertumbuhan tersebut.

Setelah mengalami kemerosotan angka persentase laju pertumbuhan hingga pada angka -0,84% di tahun 2020. Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai secara perlahan dan bertahap bangkit dari kemerosotan tersebut. Pemerintah dan masyarakat tidak sekedar berdiam diri namun berupaya maksimal untuk dapat meningkatkan laju positif angka persentase pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini didorong dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam kolaborasi untuk memperbaiki pergerakan ekonomi di berbagai bidang secara bertahap yang mengakibatkan terjadi kenaikan angka persentase laju pertumbuhan menjadi 2,52% pada tahun 2021. Kemudian, selanjutnya angka persentase laju pertumbuhan ekonomi terus secara bertahap mengalami kenaikan hingga menyentuh angka persentase sebesar 3,52% yang menunjukkan adanya peningkatan dan pertumbuhan bertahap dan berkelanjutan pada kinerja ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan hal itu diharapkan dapat terus ditingkatkan

sehingga laju pertumbuhan ekonomi tersebut mengalami kenaikan bertahap dan konsisten hingga mencapai angka di atas 5%.

Selain itu, faktor lain yang perlu mendapatkan perhatian dalam menekan angka kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator yang memberikan gambaran penilaian terhadap kualitas hidup manusia pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Dengan adanya indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka pemerintah dan pihak terkait dapat melihat gambaran penilaian yang menyajikan bagaimana keadaan kualitas hidup manusia dalam hal ini masyarakat dalam mencapai tingkat kesejahteraan. Indikator Indeks Pembangunan Manusia diperlukan untuk dapat turut membantu pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang relevan agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Tabel 1.3
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupate/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2023

Periode	Indeks Pembangunan Manusia (%)
2013	61,68
2014	62,26
2015	62,67
2016	63,13
2017	63,73
2018	64,39
2019	65,23
2020	65,19
2021	65,28
2022	65,90
2023	66,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS, data diolah, 2024

Berdasarkan pada Tabel 1.3 yang menunjukkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan secara perlahan dari tahun 2013 sampai pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 persentase IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur menurun sebesar 0,04% mengakibatkan angka persentase sebesar 65,23% pada tahun 2019 menjadi 65,19% pada tahun 2020. Tetapi pada tahun 2021, angka persentase IPM kembali mengalami peningkatan 0,09% menjadikan angka persentase pada tahun 2021 menjadi 65,28% dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 menyentuh angka persentase 66,68% dengan kenaikan angka persentase sebesar 0,78%.

Faktor berikutnya yang dianggap memiliki peranan dalam peningkatan angka kemiskinan adalah jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan menyebabkan efek negatif terhadap peningkatan angka kemiskinan apabila tidak diimbangi dengan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai sehingga hal tersebut menyebabkan penekanan pada laju pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah ketika pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan yang sangat pesat dan tidak disertai dengan perhatian khusus terhadap perkembangan kualitas sumber daya manusia maka hal itu dapat menciptakan sumber daya manusia yang kurang unggul dan kompeten dalam memiliki kesempatan untuk berkontribusi pada peningkatan ekonomi melalui berbagai tindakan pengelolaan sumber daya alam.

Tabel 1.4
Data Jumlah Penduduk dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2023`

Periode	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2013	4.953.967	1,70
2014	5.036.897	1,67
2015	5.120.061	1,65
2016	5.203.514	1,63
2017	5.287.302	1,61
2018	5.371.519	1,59
2019	5.456.203	1,58
2020	5.541.394	1,56
2021	5.394.380	0,87
2022	5.481.790	1,50
2023	5.569.070	1,64

Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS, data diolah, 2024

Berdasarkan pada Tabel 1.4 yang merupakan data jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dapat dilihat bahwa dalam rentang waktu tersebut proyeksi laju pertumbuhan penduduk mengalami perubahan yang bersifat fluktuatif namun tidak mengalami peningkatan atau pertumbuhan penduduk yang pesat. Diharapkan dengan adanya pertumbuhan penduduk, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur mampu untuk terus mengupayakan perhatian terhadap pertumbuhan penduduk dan pembentukan program-program yang mampu memberikan efek pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten agar seiring naiknya laju pertumbuhan penduduk yang secara bertahap tidak membuat provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan angka kemiskinan secara drastis.

Dalam upaya untuk menekan angka tingkat kemiskinan maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dengan berfokus pada pencapaian Angka Melek Huruf (AMH) dimana indikator tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan membaca dan menulis individu sebagai bentuk kemampuan dasar individu untuk proses belajar selanjutnya. Membaca dan menulis merupakan kemampuan dasar yang sangat penting untuk dimiliki seorang individu dalam mendorong kemampuan belajar sebagai acuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memberikan perhatian dan upaya-upaya melalui kebijakan untuk terus meningkatkan pendidikan di dalam kehidupan masyarakat serta dibutuhkan partisipasi seluruh masyarakat dalam menjalankan pendidikan sebaik mungkin.

Kurangnya Angka Melek Huruf (AMH) sebagai indikator yang mengukur kemampuan membaca dan menulis maka akan berpengaruh pada proses pembentukan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dimana hal ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tidak kompeten dan tidak unggul yang berujung kepada peningkatan angka kemiskinan di suatu daerah.

Tabel 1.5
Data Angka Melek Huruf (AMH) umur 15 tahun ke atas
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2023

Periode	Angka Melek Huruf (AMH) umur 15 tahun ke atas (%)
2013	90,36
2014	91,18
2015	91,45
2016	91,52
2017	91,68
2018	91,90
2019	93,24
2020	93,31
2021	93,85
2022	94,63
2023	95,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, BPS, data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1.5 yang menunjukkan data angka melek huruf (AMH) umur 15 tahun ke atas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat dilihat bahwa angka melek huruf (AMH) mengalami peningkatan yang baik di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan seluruh masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengupayakan dengan baik proses pendidikan sehingga dapat menciptakan

kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten. Kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul dapat membentuk suatu transformasi perekonomian di Nusa Tenggara Timur ke arah yang lebih baik sehingga perlahan dan secara bertahap angka kemiskinan Nusa Tenggara Timur dapat turun hingga pada angka di bawah 10%.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lavenia, dkk (2023) yang berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2021” menyebutkan bahwa upah minimum dan angka melek huruf memiliki efek anti-kemiskinan yang mendalam, sementara pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB), pengangguran dan jumlah penduduk semuanya memiliki efek positif terhadap kemiskinan. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Praja, dkk (2023) dengan judul “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta” menunjukkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin.

Dengan berdasarkan pada uraian berbagai faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu dengan variabel-variabel yang sama,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor tersebut dan meneliti bagaimana pengaruh setiap faktor terhadap tingkat kemiskinan dalam rangka mengurangi jumlah angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur dengan judul: **“Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Angka Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur”**

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menjadi tantangan mendesak dan tugas besar bagi pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Timur sehingga diperlukan penelitian terhadap setiap faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Jumlah Penduduk dan Angka Melek Huruf.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

2. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah jumlah penduduk secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
4. Apakah angka melek huruf secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
5. Apakah produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk dan angka melek huruf secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Untuk mengetahui apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Untuk mengetahui apakah jumlah penduduk secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Untuk mengetahui apakah angka melek huruf secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Untuk mengetahui apakah produk domestik regional bruto (PDRB), indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk dan angka melek huruf secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Hasil dan pembahasan dari penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran informasi dalam memahami pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk dan angka melek huruf terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Faktor-faktor tersebut akan diuraikan menjadi variabel-variabel yang diuji secara empiris melalui pengolahan data nyata yang signifikan dalam bentuk data sekunder untuk kemudian didapatkan hasilnya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan juga pertimbangan dalam menyusun kebijakan-kebijakan serta upaya program kerja yang berguna bagi pengentasan kemiskinan oleh pengambil kebijakan terkait.